

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



LAPORAN KINERJA

(LkjIp)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021

SIMPANG EMPAT
BULAN JANUARI TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja (LAPKIN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 telah selesai disusun.

Penyusunan LAPKIN ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 21 kegiatan dengan 10 program, dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik. Mengenai capaian indikator kinerja kegiatan tersebut akan diuraikan dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diusahakan supaya lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, Januari 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasaman Barat



EDY MURDANI,SH
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19670822 198893 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LAPKIN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat yaitu **"TERSELENGGARANYA SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG HANDAL, FEKTIF, EFISIEN MENUJU MASYARAKAT BERWAWASAN INFORMASI"**, dengan 5 (lima) misi yaitu :

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya untuk melaksanakan tugas secara profesional dalam bidang komunikasi dan informatika ;
2. Menyediakan sarana dan prasana telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah ;
3. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi ;
4. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperoleh aksebilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi ;
5. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan informasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, 11 (sebelas) kegiatan dalam 5 (Lima) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021, untuk mendukung pencapaian 5 (empat) sasaran dalam 10 (Sepuluh) indikator kinerja (outcome/output) dan 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

DAFTAR ISI

PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIFDAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI**
- B. STRUKTUR ORGANISASI**
- C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI**
- D. SUMBER DAYA MANUSIA INSTANSI**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2021**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- B. REALISASI ANGGARAN**

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN**

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang perubahan petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021
7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi , Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika : EDY MURDANI,SH
- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika : BENDRI, S.KOM
- Kepala Bidang Layanan E- Government dan APTIKA : SUNARTO, S.Pd
- Kepala Bidang Statistik dan Persandian : AMIRI, SH
- Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik : YUDHINAL REVIOLA, SE
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : ENDANG SUSANTI,SE

- Kasubag Program dan Pelaporan : ZAKIRMAN,SH
- Kasi Persandian : MEDIA TUWENTI,SE.MM
- Kasi Keamanan Informasi : SITI OLOAN HASIBUAN, SE
- Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi : SEPNUR FAUZAN,S.ST
- Kasi Kemitraan Informasi Publik : OKTAVIANTA
- Kasi Pengelola Komunikasi Publik : Ns.MITRA VEMILDA,M.Kep
- Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi : ADE IRWAN,S.Pd. MM
- Pranata Komputer Ahli : RETNO ASTUTI, S.KOM
- Analis Konten Media Sosial : SANTI PRESTIKA DORA, S.ST
- Bendahara Pengeluaran : MIZANIL ADLY, SH
- Sopir : ARNOLI

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Komunikasi dan Infromatika, Statistik dan Persandian;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Infromatika, Statistik dan Persandian;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Infromatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Komunikasi dan Infromatika, Statistik dan Persandian;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan/atau
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA INSTANSI

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika keadaan pada tanggal 2 Januari 2021 adalah sebanyak 64 orang dan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 47 orang dengan golongan sebagai berikut :

Golongan (Pegawai Negeri/ Honor)	Keadaan 2 Januari 2021 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
IV	4	4
III	12	12
II	1	1
I	-	-
Honor dan Tenaga Kontrak Daerah	47	30
Jumlah	64	47

Latar belakang pendidikan aparatur :

Pendidikan (Pegawai Negeri/ Honor)	Keadaan 2 Januari 2021 (orang)	Keadaan 31 Desember 2021 (orang)
S3	-	-
S2	4	4
S1	27	29
DIII	7	5
DII	-	-
DI	-	-
SLTA	16	9
SLTP	-	-
SD	-	-
Jumlah	64	47

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2021

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mempunyai rencana strategik (Renstra) yang berorientasi pada pengeluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkintimbul. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yaitu ***“Terselenggaranya sistem Komunikasi dan Informatika yang Handal, Efektif, Efisien menuju masyarakat berwawasan informasi”***

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat yaitu

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya untuk melaksanakan tugas secara profesional dalam bidang komunikasi dan informatika ;
2. Menyediakan sarana dan prasana telekomunikasi yang cukup serta mengintegrasikan seluruh potensi yang tersedia untuk mendukung pendapatan daerah ;
3. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi ;
4. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperoleh aksebilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi ;
5. Mendorong peningkatan aplikasi layanan publik dan industri aplikasi telematika dalam rangka meningkatkan nilai tambah layanan informasi.

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 5 (lima) tujuan sasaran strategis pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat seperti pada tabel berikut :

Tujuan 1	Mewujudkan tata kelola Pemerintah profesional, akuntabel dan inovatif
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Tujuan 2	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien dan efektif melalui sistem pemerintah berbasis elektronik
Sasaran 2	Meningkatnya koneksi antar instansi, layanan publik melalui layanan elektronik dan penyebarluasan tentang kebijakan dan pemerintah daerah

Tujuan 3	Terwujudnya Satu Data Indonesia di Kabupaten
Sasaran 3	Meningkatnya penggunaan dan Statistik dalam pengambilan keputusan

Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola dan Manajemen keamanan Informasi pemerintah, Daerah yang komprehensif, efektif dan efisien guna mendukung peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah
Sasaran 4	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik serta komprehensif dan implementasi

Tujuan 5	Mewujudkan pelayanan Publik yang berkualitas
Sasaran 5	Meningkatkan Pelayanan aplikasi dan informatika

Kebijakan dan program yang Dinas Komunikasi dan Informatika dijabarkan dalam tabel berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP 2. Persentase Penurunan temuan pemeriksaan 3. Level Maturitas SPIP	B 10 1,98
2	Meningkatnya koneksi antar instansi, layanan publik melalui layanan elektronik dan penyebarluasan tentang kebijakan dan pemerintah daerah	1. persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. % Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	3 100
		3. Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah	5

		Kab/Kota	
3	Meningkatnya penggunaan dan Statistik dalam pengambilan keputusan	OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	80
4	Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik serta komprehensif dan implementasi	Indek KAMI	1
5	Meningkatkan Pelayanan aplikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat	83

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI

Strategis adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang ditentukan secara teliti tentang bagaimana strategis akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2021 terdiri atas 5 (Lima) program yang didukung dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub terdiri atas 5 (Lima) program yang didukung dengan 10 (sepuluh) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 5 (Lima) sasaran dan 5 (Lima) tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam tabel berikut :

Mewujudkan tata kelola Pemerintah profesional, akuntabel dan inovatif				
Tujuan 1	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
Sasaran Strategis				
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		1. Program Pemenuhan upaya kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		2. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN• Penyediaan Administrasi• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			3. Administrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none">• Bimbingan teknis Implementasi Peraturan

			Perangkat Daerah	Perundang-undangan
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	
		6. Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	
Tujuan 2	Mewujudkan Tata kelola pemerintah yang efesien dan efektif melalui sistem pemrintah berbasis elektronik			
Sasaran Strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
Meningkatnya Konektivitas	1. Terciptanya layanan	1. Program Informasi dan Komunikasi	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang

antar instansi, layanan publik melalui layanan elektronik dan penyebarluasan tentang kebijakan dan pemerintah daerah	<p>elektronik yang terintegritas antar OPD berupa layanan administrasi dan layanan publik</p> <p>2. Adanya kesepakatan bersama/komitmen bersama dalam menjalankan dan mewujudkan sistem pemerintah berbasis elektronik</p>		Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Informasi dan Komunikasi Publik
				<p>2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</p> <p>3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah</p> <p>4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</p> <p>5. Pelayanan Informasi Publik</p> <p>6. Pelayanan Informasi Publik</p> <p>7. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan</p> <p>8. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</p> <p>9. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</p> <p>10. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</p>

Tujuan 3	Meningkatkan pelayanan aplikasi dan informatika			
Sasaran Strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
Mewujudkan pelayanan Publik yang berkualitas	Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Program Aplikasi Informatika	<p>1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah • Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah • Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tujuan 4	Mewujudkan Tata Kelola dan Manajemen keamanan Informasi pemerintah, Daerah yang komprehensif, efektif dan efisien guna mendukung peningkatan keamanan informasi pemerintah daerah			
Sasaran Strategis	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung	Pembangunan sistem keamanan informasi	1. Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	<p>1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik serta komprehensif dan implementasi	pemerintah daerah	Informasi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik • Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
---	-------------------	-----------	---	---

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

TAHUN 2021

INDIKATOR SASARAN (OUTPUT)		Target	Realisasi	%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%	100%	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 orang	12 orang	100
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 orang	8 orang	100
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.	5 Orang	5 Orang	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	100
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	120 Kali	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	100
5	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	100
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit	6 Unit	100
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	100
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Kali	1 Kali	100
3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Kali	1 Kali	100
4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	264 Berita	264 Berita	100
5	Pelayanan Informasi Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
6	Layanan Hubungan Media	5 Jenis Meida Masa	5 Jenis Meida Masa	100
7	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100 Peserta	100 Peserta	100
8	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	200 Orang	200 Orang	100
9	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
10	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	10 kelompok	10 kelompok	100

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 Instansi	40 Instansi	100
2	Pengelolaan e-goverment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	3 Orang	3 Orang	100
2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN

INFORMASI

1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pelaksanaan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1 Sistem	1 Sistem	100
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	100

Jumlah Anggaran Kegiatan Belanja Tahun 2021 : Rp. 6.722.058.650,-

ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA SOLUSI YANG DI LAKUKAN

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/kota

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/kota terdiri dari 1 sub Kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana. Di harapkan keluaran dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan angka kesehatan masyarakat dan membantu UMK dan UKP di daerah terdampak/potensi terhadap covid-19 di Kabupaten Pasaman Barat.
- Realisasi Pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub kegiatan
Kegiatan ini dengan anggaran total Rp. 324.146.250,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0%
- Permasalan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kegiatan ini Anggaran tidak dapat di cairkan.

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri 3 sub kegiatan

- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan. Sub kegiatan ini dengan total anggaran sebesar Rp 2.46.717.669,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 2.347.172.842
 - Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan
- ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan. Sub kegiatan ini dengan total anggaran sebesar Rp. 145.100.000,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 134.900.000,- atau 92,97%
 - Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- iii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan. Sub kegiatan ini dengan total anggaran sebesar Rp. 100.622.526,- dengan realisasi anggaran Sebesar Rp. 76.410.000
- Permasalahan dan Solusi. Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 kegiatan,

- i. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. Program ini diharapkan dapat menunjang kelancaran dan peningkatan kinerja pegawai dalam mengelola administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya dan pegawai pada khususnya.
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 19.713.550- dengan realisasi Rp. 9.527.800,- atau 48,33%
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 4 Sub kegiatan :

- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 3.890.350- dengan realisasi Rp. 1.639.000,- atau 42,13%
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 87.663.000- dengan realisasi Rp. 84.464.350,- atau 96,35%
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 292.700- dengan realisasi Rp. 292.700,- atau 100%
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Realisasi Pelaksanaan Sub kegiatan ini dengan total anggaran Rp. 169.657.000,- dengan realisasi Rp. 167.742.300,- atau 98,87%

- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan Sub kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- i. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 35.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 33.335.000,- atau 95,24% dengan realisasi fisik 100%.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- ii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 63.593.870,- dan realisasi sebesar Rp. 63.488.000,- atau 99,83% dengan realisasi fisik 100%.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

5. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari 4 Kegiatan yaitu sebagai berikut :

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 4.700.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.391.400,- atau 72,16% dengan realisasi fisik 100%.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 52.750.000,- dan realisasi sebesar Rp. 52.675.750,- atau 99,86% dengan realisasi fisik 100 %.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- iii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 11.674.600,- dan realisasi sebesar Rp. 10.849.600,- atau 92,93% dengan realisasi fisik 100 %.

- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 4.500.000,- dan realisasisebesar Rp. 4.500.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.

C. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 10 sub kegiatan :

- i. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 2.435.000,- dan realisasisebesar Rp. 895.000,- atau 36,75% dengan realisasi fisik 100 %.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- ii. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0 %.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan.
- iii. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 3.053.500,- dan realisasisebesar Rp. 2.404.100,- atau 78,73% dengan realisasi fisik 100 %.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan
- iv. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 396.609.145,- dan realisasisebesar Rp. 373.283.900,- atau 94,12% dengan realisasi fisik 100 %.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

v. Pelayanan Informasi Publik

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 15.419.000,- dan realisasisebesar Rp. 9.000.000,- atau 58,37% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

vi. Layanan Hubungan Media

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 641.076.250,- dan realisasisebesar Rp. 620.538.350,- atau 96,80% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

vii. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 9.550.000,- dan realisasisebesar Rp. 5.850.000,- atau 61,26% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

viii. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dengan realisasi fisik 0 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

ix. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- dan realisasisebesar Rp. 2.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

x. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

- Realisasi Kegiatan Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 81.709.910,- dan realisasisebesar Rp. 77.238.400,- atau 94,53% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

D. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari 1 sub kegiatan.

i. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.822.158.380,- dan realisasisebesar Rp. 1.808.065.978,- atau 99,55% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

i. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 113.267.000,- dan realisasi sebesar Rp. 107.497.400,- atau 94,91% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

ii. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 72.987.250,- dan realisasi sebesar Rp 69.461.850,- atau 95,17% dengan realisasi fisik 100 %.
- Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :

i. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan

Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 50.411.250,- dan realisasi sebesar Rp. 48.855.100,- atau 92,41% dengan realisasi fisik 100 %.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan
- ii. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 13.960.000,- dan realisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau 85,96% dengan realisasi fisik 100 %.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan
- 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**
- i. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Realisasi Kegiatan ini dianggarkan dana sebesar Rp. 1.800.000,- dan realisasi sebesar Rp 1.800.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100 %.
 - Permasalahan dan Solusi Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2021, DISKOMINFO memiliki anggaran Rp. 6.108.343.554,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.644.778.820,- atau 92,41% dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	Keuangan n(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota				
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan Akibat bencana dan/atau Berpotensi Bencana	324.146.250	0	0
Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.468.717.669	2.347.172.842	95,07
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	145.100.00	134.900.000	92,97
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.622.528	76.410.000	75,93
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.713.550	9.527.800	48,33
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.890.300	1.639.000	42,13
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.663.000	84.464.350	96,35
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	292.700	292.700	100
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.657.000	167.742.300	98,87
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	33.335.000	95,24
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.593.870	63.488.000	99,83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.700.000	3.391.400	72,16
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	52.750.000	52.675.750	99,86

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.674.600	10.849.600	92,93
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.500.000	4.500.000	100

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

16	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	2.435.500	895.000	36,75
17	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0	0
18	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	3.053.500	2.404.100	78,73
19	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	396.6009.145	373.283.900	94,12
20	Pelayanan Informasi Publik	15.419.000	9.000.000	58,37
21	Layanan Hubungan Media	641.076.250	620.538.350	96,80
22	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	9.550.000	5.850.000	61,26
23	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	0	0	0
24	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	2.000.000	2.000.000	100
25	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	81.709.910	77.238.400	94,53

Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

26	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.822.158.380	1.808.065.978	99,55
----	---	---------------	---------------	-------

Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

27	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	113.267.000	107.497.400	94,91
28	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	72.987.250	69.461.580	95,17

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

29	Pelaksanaan Analis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	50.411.250	48.855.100	96,91
----	---	------------	------------	-------

30	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13.960.000	12.000.000	85,96
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
31	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.800.000	1.800.000	100
	Jumlah	6.108.343.554	5.644.778.820	92,4

BAB IV

PENUTUP

1. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat telah merencanakan dan melaksanakan 21 Kegiatan dalam 10 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2021, untuk mendukung pencapaian 4 sasaran dan 4 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

2. Realisasi Anggaran

No	Urusan Penunjang	Belanja tidak langsung	Belanja langsung			Total Belanja	Realisasi Belanja	Percentase	Nama-nama SKPD pelaksana
			Belanja pegawai	Belanja barang dan jasa	Belanja Modal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.583.140.195	2.583.140.195	3.903.907.940	235.010.515	6.722.058.650	6.137.228.820	91,30	DISKOMINFO

Realisasi anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika dimana belanja langsung dan Belanja Tidak langsung dengan total belanja sebesar Rp. 6.722.058.650,- dengan realisasi belanja Rp. 6.137.228.820- persentase berkisar 91,30% .